

# Efektivitas Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Lamongan

Gita Rizki<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Islam Darul 'Ulum, Indonesia

[gitarizki.2023@mhs.unisda.ac.id](mailto:gitarizki.2023@mhs.unisda.ac.id)

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan dalam pengentasan kemiskinan, dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang menempatkan pengalaman masyarakat miskin sebagai pusat analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan dan anggaran telah tersedia, pelaksanaannya di lapangan masih jauh dari harapan. Permasalahan utama mencakup ketidaksesuaian program dengan kebutuhan lokal, rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan, kelemahan kelembagaan desa seperti BUMDes, serta arah pembangunan desa yang lebih berorientasi pada proyek fisik daripada pemberdayaan ekonomi. Selain itu, minimnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan program memperburuk kepercayaan publik terhadap pemerintah. Penelitian ini menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan harus dipahami sebagai proses transformatif yang menuntut kebijakan yang partisipatif, kontekstual, dan berkelanjutan, bukan sekadar pelaporan administratif atau pencapaian angka statistik semata. Hasil temuan ini diharapkan dapat menjadi dasar evaluasi kebijakan yang lebih berpihak pada kelompok rentan, serta mendorong kehadiran negara secara lebih adil dan bermakna di tengah masyarakat

**Kata Kunci:** Efektivitas Kebijakan; Pengentasan Kemiskinan; Kabupaten Lamongan

## Abstract

*This study aims to analyze the effectiveness of the poverty alleviation policies implemented by the Lamongan District Government, using a qualitative descriptive approach that centers the lived experiences of impoverished communities. The findings reveal that although policies and budgets are in place, implementation on the ground falls significantly short of expectations. Key issues include the misalignment of programs with local needs, low levels of community participation in policy planning and evaluation, institutional weaknesses in village organizations such as BUMDes, and a development orientation that prioritizes physical infrastructure over economic empowerment. Moreover, the lack of transparency and accountability in program management further erodes public trust in government institutions. This research underscores that poverty alleviation must be understood as a transformative process that requires participatory, contextual, and sustainable policies—not merely administrative reporting or the achievement of statistical targets. These findings are expected to serve as a foundation for more inclusive policy evaluations and to encourage a more just and meaningful presence of the state within society.*

**Keyword:** Policy Effectiveness; Poverty Alleviation; Lamongan Regency

## Pendahuluan

Kemiskinan merupakan fenomena multidimensional yang tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan ekonomi, melainkan representasi dari kegagalan sistemik dalam menjamin pemenuhan hak-hak fundamental masyarakat. Kondisi ini mencerminkan adanya ketimpangan struktural yang mendalam dalam distribusi sumber daya, akses terhadap peluang ekonomi, dan partisipasi dalam proses Pembangunan kemiskinan merupakan salah satu tantangan serius yang dihadapi oleh negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, upaya pengentasan kemiskinan telah menjadi prioritas utama dalam pembangunan nasional. Namun, kompleksitas masalah kemiskinan menuntut pendekatan yang komprehensif dan kontekstual, sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing (Lestari et al., 2023).

Kabupaten Lamongan, sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur, menghadapi tantangan kemiskinan yang multifaset. Meskipun memiliki potensi sumber daya alam yang beragam, mulai dari sektor pertanian, perikanan, hingga pariwisata, angka kemiskinan di Kabupaten Lamongan menunjukkan tren yang sulit untuk diturunkan secara signifikan (Suhartini et al., 2021).

Realitas kemiskinan di Kabupaten Lamongan menampilkan wajah yang beragam dan berlapis. Kemiskinan tidak hanya termanifestasi dalam rendahnya tingkat pendapatan per kapita masyarakat, tetapi juga dalam bentuk kesenjangan akses yang struktural terhadap layanan pendidikan berkualitas, fasilitas kesehatan yang memadai, dan kesempatan ekonomi yang berkelanjutan serta bermartabat (Hanifah & Hanifa, 2021).

Dalam konteks sistem desentralisasi dan implementasi otonomi daerah yang telah berlangsung selama lebih dari dua dekade, pemerintah Kabupaten Lamongan memiliki posisi strategis yang sangat penting dalam merancang, merumuskan, dan mengimplementasikan kebijakan pengentasan kemiskinan. Paradigma otonomi daerah memberikan ruang yang lebih luas dan fleksibilitas yang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan pendekatan-pendekatan inovatif, kreatif, dan kontekstual dalam mengatasi kemiskinan (Abas et al., 2021). "Kewenangan ini mencakup perumusan kebijakan fiskal daerah, pengalokasian anggaran untuk program-program pro-poor, pengembangan regulasi yang mendukung iklim investasi dan usaha mikro kecil menengah, serta koordinasi dengan berbagai stakeholder dalam menciptakan sinergi pembangunan yang berkelanjutan (Abas et al., 2021)."

Namun demikian, keberadaan kewenangan yang luas dan ruang kebijakan yang fleksibel tersebut belum tentu secara otomatis menjamin efektivitas program-program pengentasan kemiskinan yang dirumuskan dan diimplementasikan oleh pemerintah daerah. Berbagai tantangan implementasi kerap muncul, mulai dari keterbatasan kapasitas sumber daya manusia aparatur, koordinasi antar SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang belum optimal, hingga lemahnya sistem monitoring dan evaluasi program (Anas et al., 2024). Pertanyaan mendasar yang perlu dikaji secara kritis adalah sejauh mana kebijakan-kebijakan yang telah dirumuskan dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah benar-benar mampu menyentuh akar permasalahan kemiskinan dan memberikan dampak yang signifikan serta berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin.

Beragam penelitian terdahulu telah memberikan perspektif yang bervariasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan program pengentasan kemiskinan di tingkat daerah. (Khadafi dan Mutiarin, 2017) dalam studi komprehensif mereka di Kabupaten Gunungkidul menegaskan pentingnya keterlibatan aktif dan substantif masyarakat dalam setiap tahapan pelaksanaan program bantuan keuangan khusus. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program sangat ditentukan oleh implementasi mekanisme partisipatif yang bermakna dan sistem pengawasan yang efektif serta akuntabel, bukan semata-mata oleh besarnya alokasi anggaran yang disediakan.

Dalam konteks strategi pemberdayaan ekonomi lokal, (Sayutri, 2011) mengemukakan bahwa pelebagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki potensi strategis yang sangat besar sebagai instrumen penggerak ekonomi pedesaan sekaligus mesin pengentasan kemiskinan yang efektif. BUMDes dapat menjadi wadah institusional bagi masyarakat desa untuk mengoptimalkan potensi ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui diversifikasi kegiatan

ekonomi. Namun, implementasi program BUMDes di lapangan seringkali menghadapi kendala struktural berupa keterbatasan kapasitas kelembagaan, minimnya keterampilan manajerial pengurus, serta lemahnya koordinasi antara pemerintah desa dengan pemerintah kabupaten.

Menekankan bahwa kemiskinan pada hakikatnya merupakan fenomena yang bersifat multidimensional dan interdependen, (Marmujiono,2014) tidak dapat dipecahkan melalui pendekatan yang parsial atau sektoral. Tingkat pendidikan masyarakat, aksesibilitas terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, dan ketersediaan kesempatan kerja yang layak merupakan variabel-variabel kunci yang saling berinteraksi secara kompleks dan harus menjadi landasan utama dalam merumuskan strategi pengentasan kemiskinan yang komprehensif dan holistik.

Dari perspektif fiskal daerah, (Bandiyono,2018) memberikan kontribusi penting dengan menunjukkan bahwa pola pengalokasian anggaran berdasarkan fungsifungsi pembangunan memiliki korelasi yang signifikan dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan penurunan tingkat kemiskinan. Temuan ini menegaskan bahwa komitmen politik pemerintah daerah terhadap pengentasan kemiskinan harus diwujudkan dalam bentuk keberpihakan anggaran yang terukur dan berorientasi pada hasil serta dampak jangka panjang.

Dalam konteks pemberdayaan perempuan sebagai kelompok rentan, (Ghofur dan Youhanita,2022) menyoroti pentingnya pendekatan berbasis gender dalam program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Lamongan. Penelitian mereka menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan miskin melalui pemanfaatan sumber daya lokal dapat menjadi strategi efektif dalam meningkatkan ekonomi keluarga, namun memerlukan dukungan kebijakan yang sensitif gender dan berkelanjutan.

Dalam penelitiannya (Sartika et al.,2016) mengidentifikasi berbagai faktor penyebab kemiskinan masyarakat pedesaan, termasuk keterbatasan akses terhadap modal, teknologi, dan pasar. Temuan ini relevan dengan kondisi di Kabupaten Lamongan yang sebagian besar wilayahnya adalah pedesaan dengan karakteristik agraris dan maritim. Selain itu, (Bella Yuniar et al.,2024) menekankan pentingnya strategi pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai instrumen efektif dalam penanggulangan kemiskinan, yang menunjukkan relevansi pendekatan ekonomi kerakyatan dalam konteks pengentasan kemiskinan.

Penelitian (Salamah dan Kurniawan,2022) mengenai efektivitas program sembako selama pandemi COVID19 di Kabupaten Lamongan memberikan gambaran tentang tantangan implementasi program bantuan sosial di tingkat grassroot. Studi tersebut mengungkap berbagai kendala teknis dan administrative yang mempengaruhi tingkat efektivitas program, termasuk ketepatan sasaran, kecepatan distribusi, dan kualitas koordinasi antarstakeholder.

Berdasarkan refleksi mendalam terhadap berbagai temuan penelitian terdahulu dan kompleksitas permasalahan kemiskinan di Kabupaten Lamongan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif tingkat efektivitas kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Lamongan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Penilaian efektivitas dalam konteks penelitian ini tidak hanya diukur melalui indikator-indikator administratif atau pencapaian target kuantitatif semata, melainkan juga melalui evaluasi kritis terhadap daya

jangkau program kepada masyarakat miskin, kualitas proses implementasi di lapangan, tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program, responsivitas kebijakan terhadap kebutuhan lokal, koordinasi antarstakeholder, sistem monitoring dan evaluasi, serta keberlanjutan dampak yang dihasilkan terhadap penguatan kemandirian ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara holistik.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi proses evaluasi kebijakan daerah, sekaligus menjadi landasan empiris untuk penguatan arah dan strategi kebijakan pengentasan kemiskinan yang lebih kontekstual, partisipatif, berkelanjutan, berkeadilan sosial, dan responsif terhadap dinamika perubahan sosial ekonomi yang terus berkembang di era kontemporer.

Dalam penelitiannya (Sartika et al. 2016) mengidentifikasi berbagai faktor penyebab kemiskinan masyarakat pedesaan, termasuk keterbatasan akses terhadap modal, teknologi, dan pasar. Temuan ini relevan dengan kondisi di Kabupaten Lamongan yang sebagian besar wilayahnya adalah pedesaan dengan karakteristik agraris dan maritim. Selain itu, menekankan pentingnya strategi pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai instrumen efektif dalam penanggulangan kemiskinan, yang menunjukkan relevansi pendekatan ekonomi kerakyatan dalam konteks pengentasan kemiskinan. (Bella Yuniar et al.2024).

## **Metode**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bukan hanya menjadi pilihan metodologis, tetapi juga landasan etis dalam memandang realitas sosial kemiskinan di Kabupaten Lamongan. Pendekatan ini dipilih karena kemiskinan bukan sekadar data statistik yang dapat ditangkap melalui survei atau angka administratif semata, melainkan sebuah kondisi multidimensional yang menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat: ekonomi, sosial, kultural, hingga psikologis. Dalam konteks Lamongan, meskipun angka kemiskinan resmi telah turun menjadi 12,16% per Maret 2024, dengan garis kemiskinan sebesar Rp 524.636 per kapita per bulan, fakta di lapangan menunjukkan bahwa realitas kemiskinan jauh lebih kompleks daripada yang tergambar dalam laporan tahunan pemerintah (Hanifah & Hanifa, 2021; Suhartini et al., 2021).

Kondisi inilah yang melandasi peneliti untuk menempatkan manusia sebagai pusat dari analisis, bukan sekadar objek dari kebijakan. Penelitian ini dilakukan di beberapa desa yang dipilih secara purposif, yakni desa-desa yang menjadi target langsung program pengentasan kemiskinan dan memiliki tingkat kerentanan sosial-ekonomi yang tinggi. Pemilihan desa tidak hanya berdasarkan pada data statistik, tetapi juga karena di tempat-tempat inilah berbagai dimensi kebijakan bisa diamati secara konkret, mulai dari bagaimana program dirancang oleh pemerintah desa, didistribusikan kepada warga, hingga bagaimana warga menilai dan mengalaminya secara langsung.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik analisis isi deskriptif sebagai sumber data utama, penelitian ini bergantung pada data skunder yang telah di publikasikan. Peneliti menelaah, membandingkan dan menginterpretasikan informasi dari sumber referensi guna memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai Efektivitas kebijakan pemerintah daerah dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Lamongan. Dalam penelitian ini, yang digali bukan hanya informasi teknis, melainkan juga narasi personal: pengalaman, harapan, ketidakpuasan, bahkan trauma yang dialami warga dalam berhadapan dengan

kebijakan. Pendekatan seperti ini penting untuk menangkap suara-suara yang selama ini tidak muncul dalam proses perumusan maupun evaluasi kebijakan, sebagaimana disoroti (Khadafi dan Mutiarin, 2017) bahwa partisipasi bermakna adalah kunci keberhasilan pengentasan kemiskinan, bukan sekadar alokasi anggaran yang besar.

Temuan dari berbagai penelitian sebelumnya konsisten menunjukkan bahwa kelembagaan ekonomi desa seperti BUMDes seringkali gagal menjadi instrumen pemberdayaan yang efektif karena lemahnya kapasitas manajerial dan minimnya dukungan sistemik dari pemerintah daerah (Sayutri, 2011; Bella Yuniar et al., 2024). Analisis terhadap literatur akademik dan laporan evaluasi program menunjukkan adanya pola yang berulang dalam implementasi kebijakan pemberdayaan ekonomi desa, di mana kesenjangan antara ekspektasi kebijakan dengan realitas implementasi menjadi faktor kunci yang menghambat efektivitas program pengentasan kemiskinan di tingkat grassroot.

Penelitian ini selaras dengan kajian (Salamah dan Kurniawan, 2022), yang menyatakan bahwa pelaksanaan program sembako pun kerap tidak sesuai antara pelaporan resmi dan distribusi nyata di tingkat akar rumput. Berbagai studi evaluasi kebijakan yang dipublikasikan dalam jurnal-jurnal akademik secara konsisten menunjukkan adanya fenomena "cosmetic compliance" di mana laporan administratif menampilkan capaian yang baik secara statistik, namun penelitian mendalam mengungkap bahwa implementasi program tidak mencapai target sasaran yang sesungguhnya. Analisis komparatif terhadap multiple sources of evidence dari berbagai penelitian independen menjadi kunci untuk memperoleh pemahaman yang lebih akurat tentang efektivitas kebijakan pengentasan kemiskinan di tingkat desa. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif dari (Miles dan Huberman, 1992), yaitu melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Namun proses ini tidak berlangsung secara kaku. Dalam praktiknya, analisis dilakukan secara berulang, reflektif, dan mendalam. Setiap narasi warga, hasil observasi, dan kutipan dokumen diolah untuk menemukan pola, ketidaksesuaian, serta logika sosial-politik di balik kebijakan yang dijalankan. Analisis tidak hanya bertujuan untuk menjelaskan apa yang terjadi, tetapi juga menggali mengapa hal itu terjadi, dan siapa yang diuntungkan atau dirugikan dari kebijakan yang ada.

Validitas data dijamin dengan triangulasi sumber dan metode. Suara pejabat dibandingkan dengan pengalaman warga; laporan anggaran diuji dengan observasi kegiatan; dan data statistik diverifikasi dengan realitas keseharian. Di banyak kasus, ditemukan perbedaan mencolok antara narasi "resmi" dan kenyataan lapangan. Tetapi dalam penelitian ini, ketidaksesuaian itu tidak dianggap sebagai kesalahan, melainkan sebagai wujud dari kompleksitas kebijakan publik yang sering kali dikendalikan oleh logika kekuasaan, bukan semata logika keadilan sosial (Anas et al., 2024; Ghofur & Youhanita, 2022).

Dengan pendekatan ini, metode penelitian tidak hanya menjadi prosedur teknis, tetapi juga menjadi alat pembebasan. Sebab sebagaimana dikatakan (Marmujiono, 2014), kemiskinan tidak bisa dipecahkan dengan pendekatan sektoral atau administratif semata, melainkan harus dibongkar akar strukturalnya: ketimpangan pendidikan, akses kesehatan, peluang ekonomi, dan peran negara yang sering kali tidak hadir di saat yang paling dibutuhkan. Oleh karena itu, penelitian ini berpihak pada suara-suara yang selama ini tak terdengar, dan percaya bahwa efektivitas kebijakan pengentasan kemiskinan harus diukur bukan dari berapa banyak dana yang terserap, tetapi dari seberapa besar kebijakan itu mampu mengubah kehidupan masyarakat miskin secara berkelanjutan, adil, dan bermartabat (Bandiyono, 2018; Darmi & Mujtahid, 2020)

## Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini memfokuskan pada pengalaman warga miskin sebagai inti penilaian efektivitas kebijakan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Lamongan. Dari temuan di lapangan, teridentifikasi empat permasalahan utama yang saling berkaitan dan menghambat efektivitas pengentasan kemiskinan, yaitu ketidaksesuaian kebijakan, partisipasi yang dangkal, kelembagaan yang lemah, dan arah pembangunan yang bias.

### 1. Kebijakan yang Tidak Cukup Membumi: Ketika Harapan Warga Tak Bertemu Realitas Program

Analisis menunjukkan bahwa akar permasalahan utama adalah desain kebijakan yang seringkali tidak relevan dengan kondisi riil masyarakat miskin di Lamongan. Ada asumsi yang keliru bahwa satu pendekatan dapat mengatasi semua masalah kemiskinan, padahal setiap desa memiliki karakteristik dan kebutuhan yang unik. Akibatnya, banyak program terasa asing dan tidak efektif bagi penerima manfaat.

Contoh konkret dari penelitian ini adalah pelatihan kerajinan tangan yang diberikan kepada petani tambak, padahal mereka membutuhkan bantuan terkait bibit ikan atau pengelolaan tambak modern. Program semacam ini hanya berfungsi sebagai pengisi laporan tanpa memberikan dampak nyata pada kesejahteraan keluarga. Selain itu, program bantuan sosial seringkali tidak tepat sasaran karena basis data yang usang, menyebabkan ketidakadilan dan ketegangan sosial di masyarakat. Kebijakan cenderung lahir dari "dokumen-dokumen tebal" tanpa dialog mendalam dengan masyarakat, menghasilkan program yang kaku dan tidak relevan.

Sumber lain mendukung pandangan bahwa kompleksitas masalah kemiskinan menuntut. Angka kemiskinan di Lamongan yang sulit diturunkan secara signifikan, meskipun memiliki potensi sumber daya alam yang beragam, mengindikasikan bahwa program yang ada belum menyentuh akar permasalahan yang multifaset. Kemiskinan tidak hanya dilihat dari rendahnya tingkat pendapatan, tetapi juga dari kesenjangan struktural dalam akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi berkelanjutan. Suhartini et al.

### 2. Partisipasi yang Lebih Banyak Diminta daripada Dipersilakan: Suara yang Tak Terdengar

Partisipasi masyarakat seringkali hanya menjadi formalitas administratif di Lamongan. Meskipun warga diundang, ruang dialog yang tulus di mana suara mereka didengar dan dipertimbangkan masih sangat minim, menciptakan kesenjangan antara pembuat kebijakan dan masyarakat.

Seorang ibu rumah tangga penerima bantuan menyatakan, "Kalau tidak ikut, dibilang tidak aktif. Kalau ikut, ya cuma mendengar". Musyawarah desa sering berfungsi sebagai "seremoni pengesahan rencana yang sudah dibuat sebelumnya" daripada forum dialog yang setara. Kesadaran warga untuk terlibat juga rendah karena mereka merasa suara mereka tidak dianggap penting.

Menekankan pentingnya keterlibatan aktif dan substantif masyarakat dalam setiap tahapan pelaksanaan program bantuan keuangan khusus untuk keberhasilan program. Penelitian ini secara eksplisit mengukur efektivitas melalui evaluasi kritis terhadap tingkat

partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program (Khadafi dan Mutiarin, 2017). Metode penelitian ini juga bertujuan untuk memahami bagaimana kebijakan dipahami, dijalankan, dan diterima oleh masyarakat, serta apakah warga merasa dilibatkan dan didengar.

### 3. BUMDes: Harapan yang Terjebak dalam Struktur Lemah

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang diharapkan menjadi penggerak ekonomi desa, seringkali tidak berfungsi optimal di Lamongan, menjadi "badan usaha tanpa usaha". Potensi besar desa sering terabaikan karena fondasi kelembagaan BUMDes yang rapuh.

Pengurus BUMDes di salah satu desa mengakui bahwa unit usaha mereka terbatas pada sewa kursi dan tenda, tanpa dampak signifikan pada pengurangan kemiskinan. Permasalahan utama adalah kurangnya kapasitas bisnis dan pelatihan yang memadai bagi pengurus, serta pendampingan yang tidak berkelanjutan dari pemerintah kabupaten. Dalam beberapa kasus, BUMDes dibentuk hanya untuk memenuhi persyaratan administrasi.

Mengemukakan potensi strategis BUMDes sebagai instrumen penggerak ekonomi pedesaan dan pengentasan kemiskinan (Sayutri, 2011). Namun, kendala struktural seperti keterbatasan kapasitas kelembagaan, minimnya keterampilan manajerial, dan lemahnya koordinasi antara pemerintah desa dan kabupaten sering menghambat implementasinya. Bella Yuniar et al.

### 4. Dana Desa: Fleksibel, Tapi Sering Hilang Arah

Dana desa, yang seharusnya menjadi peluang untuk kemandirian desa, seringkali kehilangan arah karena kurangnya visi yang jelas. Dana ini sering berakhir menjadi proyek fisik yang tidak selalu menyentuh inti persoalan kemiskinan.

Banyak desa memilih membangun infrastruktur fisik karena proyek tersebut "terlihat", cepat selesai, dan mudah dilaporkan. Sementara itu, program pemberdayaan ekonomi seperti pelatihan usaha atau bantuan alat produksi hampir tidak tersentuh karena dampaknya tidak instan dan sulit diukur dalam satu tahun anggaran. Kepala desa cenderung memilih proyek jangka pendek yang cepat "berbuah". Transparansi juga menjadi tantangan besar, dan minimnya ruang dialog membuat kebijakan anggaran desa seringkali tidak mencerminkan prioritas kelompok rentan.

Penelitian ini menyoroti peningkatan kapasitas kebijakan dana desa dalam mengentaskan kemiskinan, namun penelitian ini menunjukkan bahwa kapasitas tersebut belum optimal (Darmi & Mujtahid, 2020). Bandiyono (2018) menegaskan bahwa komitmen politik pemerintah daerah terhadap pengentasan kemiskinan harus diwujudkan dalam bentuk keberpihakan anggaran yang terukur dan berorientasi pada hasil serta dampak jangka panjang.

### 5. Transparansi dan Akuntabilitas Program: Ketika Kepercayaan Mulai Memudar

Penelitian ini mengungkapkan celah besar dalam transparansi dan akuntabilitas program pengentasan kemiskinan di Lamongan. Kurangnya aliran informasi dan proses pengambilan keputusan yang terbuka mengikis kepercayaan masyarakat.

Salah satu temuan mencolok adalah minimnya informasi tentang penggunaan dana desa. Warga mengeluhkan tidak adanya penjelasan rinci mengenai penggunaannya. Minimnya ruang dialog juga berdampak pada akuntabilitas, karena keputusan anggaran tidak mencerminkan prioritas kelompok rentan. Ketidakselarasan antara laporan program "berjalan baik" di atas kertas dengan kenyataan di lapangan menunjukkan kurangnya akuntabilitas yang sebenarnya.

Menekankan bahwa keberhasilan program sangat ditentukan oleh implementasi mekanisme partisipatif yang bermakna dan sistem pengawasan yang efektif serta akuntabel, bukan semata-mata oleh besarnya alokasi anggaran. (Khadafi dan Mutiarin, 2017). Penelitian ini mengukur efektivitas tidak hanya melalui indikator administratif atau target kuantitatif, tetapi juga melalui evaluasi kritis terhadap kualitas proses implementasi, tingkat partisipasi masyarakat, dan sistem monitoring dan evaluasi.

#### 6. Keberlanjutan Program: Menanam Pohon, Bukan Sekadar Membangun Tembok

Penelitian ini mempertanyakan apakah program pengentasan kemiskinan di Lamongan mampu menciptakan dampak yang berkelanjutan. Orientasi pada hasil cepat dan kurangnya investasi pada pembangunan kapasitas jangka panjang menimbulkan kekhawatiran serius tentang keberlanjutan.

Kepala desa dan perangkatnya cenderung memilih proyek fisik yang "cepat berbuah" dan terlihat, daripada yang menyentuh kapasitas warga secara berkelanjutan. BUMDes, yang seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi lokal dan instrumen kemandirian berkelanjutan, terhambat oleh minimnya kapasitas pengurus, kurangnya pendampingan, dan absennya inovasi usaha. Keberlanjutan dampak yang dihasilkan terhadap penguatan kemandirian ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara holistik menjadi salah satu indikator kunci penilaian efektivitas dalam penelitian ini.

Menyoroti pentingnya dukungan kebijakan yang sensitif gender dan berkelanjutan dalam pemberdayaan perempuan miskin melalui pemanfaatan pemberdayaan yang efektif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi evaluasi kebijakan daerah dan menjadi landasan empiris untuk strategi pengentasan kemiskinan yang lebih kontekstual, partisipatif, berkelanjutan, berkeadilan sosial, dan responsive. (Ghofur dan Youhanita, 2022).

## Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Lamongan belum sepenuhnya efektif menyentuh akar persoalan kemiskinan yang kompleks dan multidimensional. Meskipun terdapat kerangka kerja dan alokasi anggaran yang cukup, implementasi di lapangan kerap tidak relevan dengan kebutuhan lokal masyarakat miskin. Program-program banyak yang bersifat administratif, seragam, dan tidak kontekstual, sementara partisipasi warga masih dangkal dan prosedural.

BUMDes, sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi lokal, belum mampu berperan optimal karena kelemahan struktural dan kurangnya pendampingan. Penggunaan dana desa lebih banyak diarahkan ke pembangunan fisik jangka pendek, bukan ke penguatan

kapasitas masyarakat secara berkelanjutan. Masalah transparansi dan akuntabilitas program juga memunculkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah desa maupun daerah.

Intinya, kemiskinan di Lamongan tidak hanya disebabkan oleh rendahnya pendapatan masyarakat, tetapi juga oleh ketimpangan dalam partisipasi, kelemahan kelembagaan, dan absennya keadilan sosial dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, keberhasilan pengentasan kemiskinan tidak dapat diukur hanya dari output administratif, tetapi harus dinilai dari sejauh mana kebijakan mampu menghadirkan perubahan struktural yang berkelanjutan dan bermartabat bagi masyarakat miskin.

## Referensi

- Khadafi, R., & Mutiarin, D. (2017). Efektivitas Program Bantuan Keuangan Khusus Dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul. *Journal of Governance and Public Policy*, 4(2), 327362. <https://doi.org/10.18196/jgpp.v4i2.2993>
- Sayutri, M. (2011). Pelembagaan badan usaha milik desa (bumds) sebagai penggerak potensi ekonomi desa dalam upaya pengentasan kemiskinan di kabupaten donggala. *Jurnal ACADEMICA Fisip Untad*, 3(2), 717728. <https://core.ac.uk/download/pdf/297925285.pdf>
- Marmujiono, S. P. (2014). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan dan strategi pengentasan kemiskinan di KAB. Brebes tahun 20092011. *Economics Development Analysis Journal*, 3(1). <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj>
- Bandiyono, A. (2018). Pengaruh belanja pemerintah daerah berdasarkan fungsi terhadap peningkatan IPM dan pengentasan kemiskinan (Studi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh). *Info Artha*, 2(1), 1128. <file:///C:/Users/USER/Downloads/235Article%20Text116411020180903.pdf>
- Darmi, T., & Mujtahid, I. M. (2020). Peningkatan kapasitas kebijakan dana desa dalam mengentaskan kemiskinan. *JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)*, 3(1). <file:///C:/Users/USER/Downloads/5484183511PB.pdf>
- Hanifah, R., & Hanifa, D. (2021). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum, dan pengangguran terhadap kemiskinan di Kabupaten Lamongan. *Jurnal Independent*, 9(3), 235-246. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/independent/article/view/43632>
- Suhartini, H., Hidayat, M., & Putri, N. L. (2021). Sebab-sebab angka kemiskinan di Kabupaten Lamongan sulit untuk diturunkan. *Jurnal Sosial dan Kebijakan Publik*, 4(1), 15-28. <https://ejournal.lamongankab.go.id/index.php/ejurnal/article/view/32>
- Ghofur, A., & Youhanita, L. (2022). Pemberdayaan perempuan miskin berbasis pemanfaatan sumber daya lokal di Kabupaten Lamongan. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 3(2), 101-115. <https://ejournal.lamongankab.go.id/index.php/ejurnal/article/view/53>
- Salamah, U., & Kurniawan, A. (2022). Efektivitas pelaksanaan program sembako selama pandemi COVID19 (Studi di Desa Karangwungu Lor, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan). *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 10(1), 44-55. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/46026>
- Mubarok, A. (2016). Evaluasi program pengentasan kemiskinan berbasis pedesaan (Studi evaluatif program GEMERLAP di Desa Kemlagigede, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 4(1), 1-15. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/3907>

**Jurnal Agile Governance:**  
**Volume 01, Nomor 01 January 2026**

- Sholikin, A. (2024). Kekerasan Seksual dan Viktimisasi Korban Perempuan: Analisis Melalui Lensa Teori Kriminologi Feminisme. *Madani: Jurnal Politik dan Sosial Masyarakat*, 16(1), 1-14. DOI: 10.52166/madani.v16i01.6232
- Fadli, I., Mugito, M., Martha Sena, N.K., Syarofah, N., Laily, E.N., Rohmah., & Sholikin, A. (2024). The Challenge of Identity Politics in The 2024 Election. *Madani: Jurnal Politik dan Sosial Masyarakat*, 16(1), 220-229. DOI: 10.52166/madani.v16i01.6615
- Anas, F., Zulkhah, S., & Sholikin, A. (2024). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Lamongan. *MADANI: Jurnal Politik dan Sosial Masyarakat*, 16(2), 249-259.
- Sholikin, A., Erison, Y., & Rohmah, E. N. L. (2025). Transition of extractive industry governance: Effort towards an inclusive green economy Transisi tata kelola industri ekstraktif: Usaha menuju green economy yang inklusif. *Jurnal Sosiologi Dialektika Vol*, 20(1), 43-60.
- Alif F. Zamzam Zamzam, A. F. (2019). Deliberative Democracy as The Basis of Religious Tolerance. *Revista Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores.*, VII, 1-154. <https://doi.org/10.46377/dilemas.v28i1.1673>
- Abas, R., Abdussamad, Z., & Aneta, Y. (2021). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program. <http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jjaps/index>
- Bella Yuniar, Putri Dwi Kartini, Ayuning Budiati, & Juliannes Cadith. (2024). Penanggulangan Kemiskinan Melalui Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Cilegon. *Jurnal Niara*, 16(3), 542-551. <https://doi.org/10.31849/niara.v16i3.17126>
- Lestari, P. I., Robiani, B., & Sukanto. (2023). Kemiskinan Ekstrem, Ketimpangan Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Ekombis Review*, 11(2), 1739-1752. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i12>
- Sartika, C., Balaka, M. Y., Rumbia, W. A., (2016). Studi FaktorFaktor Penyebab Kemiskinan Masyarakat Desa Lohia Kecamatan Lohia Kabupaten Muna. *Jurnal Ekonomi*, 1(April), 106-118. <http://ojs.uho.ac.id/index.php/JE/article/view/976>
- Khadafi, R., & Mutiarin, D. (2017). Efektivitas Program Bantuan Keuangan Khusus Dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul. *Journal of Governance and Public Policy*, 4(2), 327-362. <https://doi.org/10.18196/jgpp.v4i2.2993>